PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

UNIT KERJA : **BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANI FATIMAH ISFARJANTI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **413674**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/79 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/105 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 165.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 196.317.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 749.309.000**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.157.880.936**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**374.734.117**
	Sub Total	**Rp.**	**6.543.241.053**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**6.543.241.053**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.